BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan kuesioner sebagai data primer. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang telah disebarkan kepada 48 wajib pajak badan pada perusahaan di wilayah KPP Madya Bandung.

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Terdapat berbagai jenis perusahaan yang ada di Indonesia. Jenis-jenis perusahaan tersebut bila diklasifikasikan berdasarkan kegiatan utama yang dijalankannya, dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang dan perusahaan industri atau manufaktur.

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Salah satu contoh perusahaan jasa adalah PT. Angkasa Pura II (Persero), dan perusahaan jasa lainnya. Dalam kegiatan usahanya PT. Angkasa Pura II (Persero) melakukan kegiatan usahanya dengan menjual jasa yang berhubungan dengan perhubungan, contohnya jasa penyediaan landasan pesawat, jasa penyewaan ruang dan tanah, dan lain sebagainya.

Perusahaan Dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan kembali. Salah satu contoh perusahaan yang merupakan perusahaan dagang adalah PT. Akur Pratama atau yang lebih dikenal dengan Toserba Griya. Toserba Griya melakukan kegiatan jual beli barang tanpa mengolahnya kembali.

Perusahaan Industri atau Manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual barang jadi tersebut. Beberapa contoh perusahaan industri adalah PT. PINDAD dan PT. INTI (Persero). PT. PINDAD melakukan kegiatan usahanya dengan memproduksi senjata-senjata yang ditujukan untuk kepentingan militer Indonesia.Sedangkan PT. INTI (Persero) melakukan produksi perangkat telekomunikasi dan alat-alat elektronik serta barang-barang lainnya yang berhubungan dengan komunikasi.

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dengan melakukan kerja sama antar individu yang ada di perusahaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan struktur organisasi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia berbentuk garis dan staf, di mana wewenang dari pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya untuk semua bidang pekerjaan bantuan. Secara garis besar struktur organisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1. Dewan Direksi
    a. Direktur Utama
    b. Direktur Keuangan
    c. Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum
    d. Direktur Pemasaran
    e. Direktur Operasi dan Teknik
2. Divisi Pengembangan Bisinis
3. Divisi Sekertaris Perusahaan
4. Divisi Satuan Pengawas Intern
5. Divisi Akuntansi
6. Divisi Keuangan
7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi
8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
9. Divisi Umum
10. Divisi Operasional penjualan
11. Divisi Manajemen Proyek
12. Divisi Operasi
13. Divisi Pengadaan dan Logistik
14. Divisi Produksi dan Purna Jual
15. Divisi Pengembangan Produk

Gambar struktur organisasi perusahaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran.

4.1.3 Uraian Tugas

Tugas-tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Direksi

   Dewan Direksi adalah suatu dewan yang memimpin sebuah usaha korporasi dan menjalankan misi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dengan kinerja usaha yang menguntungkan, kepuasan pelanggan yang maksimal, serta tingkat pencapaian kinerja usaha dalam setiap tahap perkembangan. Dewan Direksi dapat dibantu oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan.

   Tugas pokok Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

   a. Menentukan strategi dan kebijakan umum perusahaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
   b. Menjalankan perusahaan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan negara atau pemerintah.
   c. Membina dan mengawasi performa unit kerja.
   d. Mengintegrasi strategi perusahaan dengan sasaran dan performasi divisi.

   Dewan Direksi dipilih dan diangkat oleh pemerintah. Dewan Direksi ini terdiri dari Direktur Utama yang membawahi Direktur Keuangan, Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum, Direktur Pemasaran, Direktur Operasi dan Teknik.

2. Divisi Pengembangan Bisinis

   Pembentukan Divisi Pengembangan Bisnis ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang pengembangan bisnis dan *regional infocomm centre of excellence (RICE).*

3. Divisi Sekertaris Perusahaan

   Pembentukan Divisi Sekertaris Perusahaan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Biro Direksi dan Pelaporan Manajemen.

4. Divisi Satuan Pengawas Intern

   Pembentukan Divisi Satuan Pengawas Intern ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Utama mengawasi jalannya kegiatan perusahaan meliputi bidang Audit Keuangan, Audit Operasi, serta bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Pengembangan Audit.

5. Divisi Akuntansi

   Pembentukan Divisi Akuntansi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Akuntansi Manajemen, Akuntansi Keuangan, Anggaran & Pelaporan, dan Sistem Akuntansi.

6. Divisi Keuangan

   Pembentukan Divisi Keuangan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Penagihan dan Penerimaan, Strategi Pendanaan, Pendanaan Operasional, Pajak & Asuransi serta Manajemen Aset.

7. Divisi Sistem dan Teknologi Informasi

   Pembentukan Divisi Sistem dan Teknologi Informasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Keuangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Sistem Informasi manajemen serta Pengembangan Sistem & Teknologi Informasi.

8. Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia

   Pembentukan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM & Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pelayanan SDM & Remunerasi, Pengembangan Sistem SDM & Organisasi, Pengembangan SDM dan Penilaian kinerja dan Manajemen Kualitas.

9. Divisi Umum

   Pembentukan Divisi Umum ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur SDM & Umum dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Umum & Rumah Tangga, Humas dan CSR/PKBL.

10. Divisi Operasional Penjualan

    Pembentukan Divisi Operasional Penjualan ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Pemasaran dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Komersial-*System Integrator*, Komersial-Pemeliharaan, Perencanaan & Pengendalian Penjualan serta Pendukung Penjualan.

11. Divisi Manajemen Proyek

    Pembentukan Divisi Manajemen Proyek ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Manajemen proyek, Perencanaan & Pengendalian Material, Perencanaan & Pengendalian Proyek dan Kualitas Proyek.

12. Divisi Operasi

    Pembentukan Divisi Operasi ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pendukung Operasi, Instalasi, *Test* & *Commissioning*, CME serta OSP.

13. Divisi Pengadaan dan Logistik

    Pembentukan Divisi Pengadaan dan Logistik ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Perencanaan & Pengendalian Logistik, Pengadaan serta Gudang dan Distribusi.

14. Divisi Produksi dan Purna Jual

    Pembentukan Divisi Produksi dan Purna Jual ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang *Managed Services*, Produksi dan Perbaikan, Pelayanan Spare Part, Perencanaan dan Pengendalian Produksi & Purna Jual serta Pendukung Produksi & Purna Jual.

15. Divisi Pengembangan Produk

    Pembentukan Divisi Pengembangan Produk ditujukan untuk mendukung dan membantu Direktur Operasi dan Teknik dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan meliputi bidang Pengembangan Produk dan Pendukung Pengembangan Produk.

4.1.4 Kegiatan Perusahaan

Secara garis besar kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba. Tetapi disamping laba, perusahan juga harus menjaga agar tetap *solvabel*, artinya selalu tersedia uang tunai agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pembayarannya. Kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut adalah :

1. Pemilik menyetorkan modal ke dalam perusahaan.
2. Kreditur memberi pinjaman kepada perusahaan.
3. Perusahaan mengolah uang atau modal menjadi aktiva produktif.
4. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
5. Penjual menjual barang atau jasa kepada pelanggan.
6. Perusahaan membayar kembali pinjaman bila perusahaan mempunyai kewajiban pembayaran atas pinjaman yang dilakukan.
7. Perusahaan membagi laba kepada pemilik.

Adapun kegiatan perusahaan bila berdasarkan jenis perusahaannya adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Jasa

   Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan jasa meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan jasa kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif seperti pembelian bangunan, tanah, dan perlengkapan untuk disewakan, serta aktiva produktif lainnya dalam menunjang kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman bila perusahaan memiliki kewajiban pembayaran pinjaman.

c. Penjualan

Penjualan yang diberikan adalah penjualan atas jasa. Penjualan jasa ini dapat berupa penyewaan gedung, penyewaan tanah, penyewaan perlengkapan dan jasa lainnya seperti jasa pemotongan rambut dan lain sebagainya.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas jasa akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

2. Perusahaan dagang

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan dagang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan dagang kegiatan pembelian meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya.

b. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

c. Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugaian atas pengembalian tersebut.

d. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

3. Perusahaan Industri atau Manufaktur

Secara garis besar, siklus kegiatan perusahaan industri sama seperti siklus kegiatan perusahaan dagang hanya berbeda pada saat pembelian dan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi.

Kegiatan perusahaan manufaktur tersebut meliputi sebagai berikut :

a. Pembelian

Dalam sebuah perusahaan industri kegiatan pembelian meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong dan jasa lain dalam rangka kegiatan usahanya seperti buruh langsung.

b. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi kemudian mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang jadi.

c. Pengeluaran uang atau pembayaran

Pembayaran ini disebabkan oleh adanya pembelian yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. selain itu, pembayaran juga dapat timbul karena adanya keperluan lain misalnya pengembalian pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik.

d. Penjualan

Penjualan dapat dilakukan secara kredit ataupun tunai. Penjualan secara kredit menimbulkan adanya piutang dagang. Pada saat penjualan, terkadang terdapat barang yang rusak sehingga

perusahaan harus menerima pengembalian barang atau memberi potongan harga dan menyebabkan perusahaan mengalami kerugaian atas pengembalian tersebut.

e. Penerimaan uang

Penjualan atas barang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. disamping penjualan, perusahaan akan menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman kreditur, dan sumber lainnya.

4.1.5 Karakteristik Responden

Data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung dengan jumlah responden sebanyak 48 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	%
Dagang	8	17%
Jasa	27	56%
Manufaktur	13	27%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis usaha tertentu. Data yang dipilih

melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang jenis perusahaannya dagang berjumlah 8 responden atau sebesar 17%, responden yang jenis perusahaannya jasa berjumlah 27 responden atau sebesar 56% dan responden yang jenis perusahaannya manufaktur berjumlah 13 responden atau sebesar 27%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa. Hal ini disebabkan responden yang jenis perusahaannya jasa lebih banyak jumlahnya pada saat pembagian kuesioner pada perusahaan di wilayah KPP Madya Bandung.

b. Profil Responden Berdasarkan Lama Berdiri

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama berdirinya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Lama Berdiri

Lama Berdiri	Jumlah Responden	%
s.d 1 Tahun	0	0
1-5 Tahun	7	15%
6-10 Tahun	29	60%
> 10 Tahun	12	25%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang lama berdiri perusahaannya s.d 1 tahun berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, 1-5 tahun berjumlah 7 responden atau sebesar 15%, 6-10 tahun berjumlah 29 responden atau sebesar 60%, diatas 10 tahun berjumlah 12 responden atau sebesar 25%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah yang lama berdiri perusahaannya selama 6-10 tahun.

c. Profil Responden Berdasarkan Omset Perusahaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Omset Perusahaan

Omset Perusahaan	Jumlah Responden	%
Rp. 0- Rp.500.000.000	0	0%
Rp. 500.000.000- Rp.1.000.000.000	0	0%
Rp. 1.000.000.000- Rp.5.000.000.000	16	33%
Diatas Rp.5.000.000.000	32	67%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa omset perusahaan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden mayoritas beromset Rp. 0-Rp. 500.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, omset Rp. 500.000.000-Rp. 1.000.000.000 berjumlah 0 responden atau sebesar 0%, omset Rp. 1.000.000.000-Rp. 5.000.000.000 berjumlah 16 responden atau sebesar 33% dan diatas Rp. 5.000.000.000 berjumlah 32 atau sebesar 67 %. Hal ini disebabkan karena responden yang omset perusahaannya diatas Rp. 5.000.000.000 lebih banyak menjadi responden pada saat penyebaran kuisioner pada wajib pajak badan di Wilayah KPP Madya Bandung.

d. Profil Responden Berdasarkan Status Perusahaan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Status Perusahaan

Status Perusahaan	Jumlah Responden	%
PKP	48	100%
Non PKP	0	0%
Jumlah	48	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa status perusahaan wajib pajak badan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung yang terpilih sebagai responden semuanya berstatus sebagai PKP. Hal ini disebabkan karena wajib pajak badan di Wilayah KPP Madya Bandung sudah menjadi PKP.

4.2 Pembahasan

Hasil pembahasan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penyebaran angket pada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini, selain perolehan data melalui studi pustaka untuk melengkapi data utama. Angket terdiri dari 43 pertanyaan dengan perincian 17 pertanyaan mengenai aspek formal perencanaan pajak dan 26 pertanyaan mengenai kepatuhan formal wajib pajak. Kuesioner diberikan kepada 48 orang wajib pajak badan yang berada di wilayah KPP Madya Bandung.

Teknik analisis yang digunakan pada pengolahan data berupa analisis kualitatif untuk menginterpretasikan hasil tanggapan responden melalui kuesioner. Sedangkan untuk menguji peranan aspek formal perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan digunakan analisis kuantitatif.

4.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan sebagai alat untuk mengetahui kenyataan yang terjadi mengenai variabel yang sedang diteliti. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti, yaitu penerapan aspek formal perencanaan pajak dan kepatuhan formalwajib pajak badan. Melalui tabel frekuensi akan terlihat tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner dan melalui persentase skor tanggapan responden akan dapat dilihat klasifikasi tanggapan responden sebagai representasi seluruh responden. Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 48 orang responden tentang aspek formal perencanaan pajak di wilayah KPP Madya Bandung. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.

$$\%\,\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

4.2.1.1 Aspek Formal Perencanaan Pajak Di Wilayah KPP Madya Bandung

Sebanyak 17 butir pertanyaan diajukan kepada wajib pajak orang badan untuk menilai aspek formal perencanaan pajak di wilayah KPP Madya Bandung. Kuesioner terdiri dari 3 dimensi seperti yang dijelaskan dibawah ini:

4.2.1.1.1 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada dimensi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap masing-masing indikator, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

A. Kebijakan Perpajakan

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator kebijakan perpajakan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Kebijakan Perpajakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
1	Dari manakah Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang kebijakan pajak terbaru?	**f**	0	12	5	13	18	181
		%	0	25	10.42	27.08	37.5	75.42%
2	Menurut Bapak/Ibu apa manfaat mempelajari peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak?	**f**	4	1	16	12	15	177
		%	8.333	2.083	33.33	25	31.3	73.75%
	Total	**f**	4	13	21	25	33	358
		%	4.167	13.54	21.88	26.04	34.4	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 74.58%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{358}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{358}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74.58\%$$

Cara mengetahui informasi tentang kebijakan perpajakan terbaru menurut tanggapan wajib pajak dirasakan telah di mudah oleh sebagian besar masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan hanya 24,58% saja wajib pajak yang merasakan masih mendapat memperoleh informasi terbaru tentang kebijakan perpajakn dan

persentase skor tanggapan responden sebesar 75,42% menunjukkan bahwa cara mengetahui informasi tentang kebijakan perpajakan terbaru sudah baik.

Manfaaat yang dirasakan oleh wajib pajak dengan mempelajari peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak dirasakan sudah bermanfaat, hal ini ditunjukan dengan persentase skor tanggapan responden dalam hal ini sebesar 73,75% dan hanya 26,25% wajib pajak yang merasa bahwa tidak ada manfaatnya mempelajari peraturan perpajakan dalam melaksanakan perencanaan pajak.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 74,58% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan terbaru dapat dengan mudah diketahui oleh wajib pajak dan mempelajari peraturan perpajakanpun bermanfaat untuk wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

B. Undang-Undang Perpajakan

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator undang-undang perpajakan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Administrasi Perpajakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
3	Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan?	f	3	5	9	11	20	184
		%	6.25	10.42	18.75	22.92	41.7	76,67%
4	Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah seharusnya perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan?	f	0	4	12	15	17	189
		%	0	8.333	25	31.25	35.4	78,75%
	Total	f	3	9	21	26	37	373
		%	3.125	9.375	21.88	27.08	38.5	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 77,71%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{373}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{373}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 77.71\%$$

Responden bependapat kebijakan perpajakan sudah sesuai dengan UU perpajakan hal tersebut ditunjukan dengan persentase skor tanggapan responden sebesar 76,67% dan 23,33% merasa bahwa kebijakan perpajakan tidak sesuai dengan UU perpajakan. Artinya kesesuaian kebijakan perpajakan dengan UU Perpajakan pada KPP Madya Bandung sudah baik.

Perusahaan harus bisa menjalankan kewajiban perpajaknnya sesuai dengan UU perpajakan dan banyak responden yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan, hal tersebut ditunjukan dengan persentase skor tanggapan responden sebesar 78,75% dan 21,25% merasa bahwa perusahaan tidak perlu menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan UU perpajakan. Artinya wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung sudah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 77,71% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa kriteria undang-undang perpajakan harus diperhatikan oleh wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak agar pada saat masuk ke tahapanan dalam perencanaan pajak tidak melanggar undang-undang.

C. Administrasi Perpajakan

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator administrasi perpajakan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Undang-Undang Perpajakan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
5	Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah administrasi perpajakan Indonesia sekarang ini?	f	5	3	6	16	18	183
		%	10.42	6.25	12.5	33.33	37.5	76.25%
6	Menurut Bapak/Ibu apakah pentingnya memperhatikan tentang ketentuan administrasi perpajakan?	f	1	7	15	9	16	176
		%	2.083	14.58	31.25	18.75	33.3	73.33%
	Total	f	6	10	21	25	34	359
		%	6.25	10.42	21.88	26.04	35.4	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 74.79%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 74.79\%$$

Administrasi perpajakan di Indonesia sekarang ini dirasa sudah baik karena jumlah wajib pajak yang terdaftar dan menyampaikan SPT sudah meningkat, hal tersebut ditunjukan dengan persentase skor tanggapan responden sebesar 76,25% dan 23,75% merasa bahwa administrasi perpajakan di Indonesia belum baik. Artinya wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung beranggapan bahwa administrasi perpajakan di Indonesia sudah baik.

Pentingnya memperhatikan tentang ketentuan administrasi perpajakan menurut wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung adalah agar dapat mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dan ketentuan lain tentang perpajakan, wajib pajak yang beranggapan seperti itu sebesar 33,33%.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 74,79% yang berada pada

kategori baik. Ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan sudah baik dan wajib pajak menganggap bahwa ketentuan administrasi perpajakan penting untuk diperhatikan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran motivasi dilakukannya *tax planing* pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Motivasi *Tax Planing*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kategori
1	Kebijakan Perpajakan	358	480	74,58%	Baik
2	Undang-Undang Perpajakan	373	480	77,71%	Baik
3	Administrasi Perpajakan	359	480	74,79%	Baik
	Total	**1090**	**1440**	**75,69%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Secara keseluruhan motivasi dilakukannya *tax planing* oleh wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah baik hal tersebut ditunjukan dengan persentase akumulasi skor tanggapan responden dari setiap indikator sebesar 75,69%. Wajib pajak berusaha mendapatkan informasi tentang kebijakan pajak terbaru dengan mengupdate dari situs pajak dan berupaya mempelajari peraturan perpajakan dalam melakukan perencanaan pajak. Kemudian dengan kebijakan perpajakan pada KPP Madya Bandung yang sudah sesuai dengan UU Perpajakan , wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung juga pada umumnya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Perpajakan. Karena kebijakan perpajakan yang sudah sesuai dengan UU Perpajakan, administrasi perpajakan Indonesia sekarang ini sudah baik karena jumlah wajib pajak yang terdafrtar dan menyampaikan SPT semakin meningkat, sehingga wajib

pajak badan pada KPP Madya Bandung memperhatikan ketentuan administrasi perpajakan.

4.2.1.1.2 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada dimensi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap masing-masing indikator, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

A. Menganalisis Informasi Yang Ada

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator mengenai menganalisis informasi yang ada dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menganalisis Informasi Yang Ada

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
7	Biaya yang di perkenankan aturan perpajakan untuk mengurangi penghasilan yang Bapak/Ibu ketahui?	f	0	5	2	9	32	212
		%	0	10.42	4.167	18.75	66.7	88.33%
8	Menurut Bapak/Ibu apakah yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan pajak?	f	0	13	9	12	14	171
		%	0	27.08	18.75	25	29.2	71.25%
	Total	f	0	18	11	21	46	383
		%	0	18.75	11.46	21.88	47.9	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 79.79%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{383}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{383}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 79.79\%$$

Biaya yang diperkenankan oleh aturan perpajakan untuk mengurangi penghasilan yang diketahui oleh wajib pajak badan adalah *deductible & undeductible expense* sesuai dengan UU PPh pasal 6, wajib pajak yang

beranggapan seperti itu sebesar 66,7%. Hal tersebut menunjukan bahwa wajib pajak sudah mengetahui biaya apa yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk mengurangi penghasilan.

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh wajib pajak sebelum melakukan perencanaan pajak adalah dengan cara mengetahui secara pasti apa saja kewajiban pajak yang harus dihadapi, wajib pajak yang beranggapan seperti itu sebesar 29,2%, tetapi ada juga wajib pajak yang lebih memilih untuk mengikuti perencanaan pajak tahun sebelumnya sebesar 27,08%.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 79,79% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa menganalisis informasi yang ada memang penting sebagai tahapan pertama dalam melakukan perencanaan pajak meskipun masih banyak wajib pajak meng.ikuti perencanaan pajak tahun sebelumnya.

B. Membuat Satu Atau Lebih Model Kemungkinan Jumlah Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.10
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Membuat Satu Atau Lebih Kemungkinan Jumlah Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
9	Bagaimanakah Perencanaan pajak yang Bapak/Ibu lakukan?	**f**	0	9	14	12	13	173
		%	0	18.75	29.17	25	27.1	72.08%
10	Menurut Bapak/Ibu apakah yang harus dilakukan pertama kali oleh perusahaan dalam menyusun model perencanaan pajak?	**f**	0	7	15	12	14	177
		%	0	14.58	31.25	25	29.2	73.75%
	Total	**f**	0	16	29	24	27	350
		%	0	16.67	30.21	25	28.1	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 72.92%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{350}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{350}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72.92\%$$

Penggunaan model kemungkinan jumlah pajak dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak menurut skor tanggapan responden menunjukan bahwa wajib pajak kadang menggunakan model kadang tidak sebesar 29,17%, tetapi 27,1% responden menyusun model perencanaan pajak lebih dari satu. Total skor tanggapan responden untuk hal tersebut sebesar 72,08%, itu menunjukan bahwa wajib pajak masih tetap memperhatikan tentang penyususnan model dalam melakukan perencanaan pajak.

Setelah melakukan penyusunan model perencanaan pajak, yang dilakukan oleh wajib pajak adalah memilah-memilah transaksi apa saja yang dilakukan oleh perusahaan, tanggapan responden untuk hal tersebut adalah sebesar 29,2%, tetapi lebih banyak wajib pajak yang mengikuti model perencanaan pajak tahun sebelumnya sebesar 31,25%. Total skor tanggapan responden untuk hal tersebut

sebesar 73,75%, itu menunjukan bahwa banyak diantara wajib pajak yang mengikuti model perencanaan pajak tahun lalu dan memilah-milah transaksi apa yang dilakukan oleh perusahaan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 72,92% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa dalam dalam hal membuat satu atau lebih model perencanaan pajak, wajib pajak kadang menggunakan model kadang tidak, meskipun ada yang menyusun model perencanaan pajak lebih dari satu model, setelah itu wajib pajak memilah-milah transaksi apa saja yang dilakkan perusahaan, meskipun banyak wajib pajak yang lebih memilih untuk mengikuti model perencanaan pajak tahun sebelumnya.

C. **Mengevaluasi Perencanaan Pajak**

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator mengevaluasi perencanaan pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.11
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mengevaluasi Perencanaan Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
11	Pada awal tahun berikutnya yang Bapak/Ibu lakukan untuk perencanaan pajak?	f	0	1	12	10	25	203
		%	0	2.083	25	20.83	52.1	84.58%
12	Menurut Bapak/Ibu apakah manfaat dilakukannya evalusi perencanaan pajak?	f	1	2	19	11	15	181
		%	2.083	4.167	39.58	22.92	31.3	75.42%
	Total	f	1	3	31	21	40	384
		%	1.042	3.125	32.29	21.88	41.7	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 80.00%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.00\%$$

Pada awal tahun berikutnya hal yang sering dilakukan oleh wajib pajak adalah melakukan evaluasi perencanaan pajak tahun lalu sebesar 52,1% yang artinya bahwa wajib pajak akan mengevaluasi hasil dari perencanaan pajak yang dilakukan tahun lalu agar perencanaan pajak yang akan dilakukan untuk tahun berjalan lebih baik.

Menurut wajib pajak manfaat dilakukannya evaluasi perencanaan pajak tahun lalu adalah untuk mengetahui keefektifan perencanaan pajak tersebut sebesar 39,58%, yang artinya apabila hasil perencanaan pajak tahun lalu efektif, perencanaan pajak tersebut akan dilakukan kembali untuk tahun berjalan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 80,00% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa evaluasi perencanaan pajak tahun lalu perlu dilakukan untuk mengetahui keefektifitasannya untuk dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pajak tahun berjalan.

D. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.12
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mencari Kelemahan Dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
13	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui kelemahan perencanaan pajak?	f	0	8	18	8	14	172
		%	0	16.67	37.5	16.67	29.2	71.67%
14	Setelah melakukan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan pajak, apa yang Bapak/Ibu lakukan selanjutnya?	f	4	9	11	7	17	168
		%	8.333	18.75	22.92	14.58	35.4	70.00%
	Total	f	4	17	29	15	31	340
		%	4.167	17.71	30.21	15.63	32.3	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 70.83%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{340}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{340}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 70.83\%$$

Paling banyak responden bependapat cara mengetahui kelemahan perencanaan perpajakan adalah dengan mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemudian sebanyak 29,2% responden berpendapat adalah dengan melakukan evaluasi perencanaan perpajakan. Hal tersebut dilakukan agar dapat diketahui apa saja yang harus diperbaiki dalam perencanaan pajak selanjutnya.

Setelah dilakukan evaluasi, sebesar 35,4% wajib pajak mencari kelemahan dan memperbaiki rencana pajaknya agar perencanaan pajak selanjutnya dapat lebih baik lagi,tetapi sebesar 22,92% wajib pajak hanya mencari kelemahannya saja karena mereka akan membuat perencanaan pajak yang baru.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 70,83% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa dalam mencari kelemahan dan

memperbaiki kembali rencana pajak yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengevaluasi kinerja perusahaan serta melakukan evalusai perencanaan perpajakannya setelah itu mencari kelemahan da memperbaiki rencana pajak selanjutnya.

E. Memutahirkan Rencana Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator memutahirkan rencana pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.13
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Memutakhirkan Rencana Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
15	Bagaimanakah perencanaan pajak yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk tahun berjalan?	f	0	9	10	14	15	179
		%	0	18.75	20.83	29.17	31.3	74.58%
16	Menurut Bapak/Ibu apakah pentingnya melakukan perencanaan pajak?	f	0	1	7	14	26	209
		%	0	2.083	14.58	29.17	54.2	87.08%
17	Menurut Bapak/Ibu apakah keputusan terbaik atas perencanaan pajak?	f	0	4	9	17	18	193
		%	0	8.333	18.75	35.42	37.5	80.42%
	Total	f	0	14	26	45	59	581
		%	0	9.722	18.06	31.25	41	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 80.69%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{581}{3x5x48} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{581}{720} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.69\%$$

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tahun berjalan adalah dengan memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik undang-undang maupun pelaksanaanya, hal tersebut ditunjukan dengan persentase sebesar 31,3% dan sebesar 29,17% hanya memperhitungkan dari perubahan undang-

undang. Hal tersebut menunjukan bahwa perubahan undang-undang mempengaruhi perencanaan pajak yang akan dilakukan wajib pajak untuk tahun berjalan.

Pentingnya membuat perencanaan pajak menurut wajib pajak adalah meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan hal tersebut ditunjukan dengan persentase sebesar 54,2% dan sebesar 29,17% dilakukan untuk menghindari penyelundupan pajak yang bisa terjadi. Hal tersebut menunjukan bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran yang baik untuk meminimalisasi beban pajak untuk menghindari penyelundupan pajak.

Keputusan terbaik atas suatu perencanaan pajak adalah sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi hal tersebut ditunjukan dengan persentase sebesar 37,5% dan sebesar 35,42% sesuai dengan kebijakan perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa keputusan atas perencanaan pajak dilakukan sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Dari ketiga pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 80,69% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa memutakhiran rencana pajak dengan memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik baik undang-undang maupun pelaksanaannya dan pembuatan rencana pajak dirasakan penting untuk meminimalisasi beban pajak dan menghindari penyelundupan pajak dan keputusan terbaik dalam suatu perencanaan pajak sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tahapan dalam membuat *tax planing* pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Tahapan Dalam Membuat *Tax Planing*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kategori
1	Menganalisis informasi yang ada	383	480	79,79%	Baik
2	Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak	350	480	72,92%	Baik
3	Mengevaluasi perencanaan pajak	384	480	80,00%	Baik
4	Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak	340	480	70,83%	Baik
5	Memutahirkan rencana pajak	581	720	80,69%	Baik
	Total	**2038**	**2640**	**77,19%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Secara keseluruhan tahapan *tax planing* wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah sangat baik. Wajib pajak sudah melakukan analisis informasi yang ada dengan sangat baik dan membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Kemudian melakukan evaluasi perencanaan pajak dengan sangat baik serta mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak serta sudah memutahirkan rencana pajak.

4.2.1.1.3 Implementasi Aspek Formal Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Pada dimensi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden terhadap masing-masing indikator, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

a. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator menyelenggarakan pembukuan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.15
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
32	Sepertiapakah metode pembukuan yang Bapak/Ibu lakukan?	f	0	0	0	35	13	205
		%	0	0	0	72.92	27.1	85.42%
33	Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam melakukan pembukuan?	f	0	10	10	16	12	174
		%	0	20.83	20.83	33.33	25	72.50%
	Total	f	0	10	10	51	25	379
		%	0	10.42	10.42	53.13	26	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 78.96%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{2x5x48} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{480} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78.96\%$$

Wajib pajak badan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memenuhi standar keuangan yakni sebesar 72,92%, dan sebesar 27,1% menggunakan *accrual basic* .

Cara wajib pajak badan dalam melakukan pembukuan atau pencatatan adalah dengan meminta bantuan pihak yang lebih ahli sebesar 33,33% dan sebesar 25% melakukan sendiri dengan benar.

Kriteria penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 78,96% yang termasuk dalam kriteria baik.

b. Membayar pajak.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator membayar pajak terutang tepat waktu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.16
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Membayar Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Kapankah Bapak/Ibu melakukan pembayaran pajak Bulanan?	f	7	7	12	11	11	156
		%	14.58	14.58	25	22.92	22.92	65,00%
25	Kapankah Bapak/Ibu melakukan pembayaran pajak Tahunan?	f	5	7	16	9	11	158
		%	10.42	14.58	33.33	18.75	22.92	65,83%
	Total	f	12	14	28	20	22	314
		%	12.5	14.58	29.17	20.83	22.9	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65,42%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{314}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{314}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.42\%$$

Pembayaran pajak bulanan yang banyak dilakukan oleh wajib pajak yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan persentase sebesar 25%, dan dilakukan pada awal bulan serta setiap tanggal 5 bulan berikutnya sebesar 22,92%. Hal tersebut menunjukan wajib pajak melakukan pembayaran pajak bulanannya pada saat pertengahan bulan berikutnya.

Pembayaran pajak tahunan yang banyak dilakukan oleh wajib pajak yaitu pada bulan maret berikutnya dengan persentase sebesar 33,33%, dan dilakukan pada bulan pertama tahun berikutnya sebesar 22,92%. Hal tersebut menunjukan wajib pajak melakukan pembayaran pajak tahunanya dengan cukup baik.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 65,42% yang berada pada kategori cukup baik. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah cukup baik.

c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator melaporkan pajak tepat waktu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.17
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyampaikan Surat pemberitahuan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
26	Kapankah Bapak/Ibu menyampaikan SPT Masa?	f	7	8	9	13	11	157
		%	14.58	16.67	18.75	27.08	22.9	65,42%
27	Kapankah Bapak/Ibu menyampaikan SPT Tahunan?	f	7	6	17	11	7	149
		%	14.58	12.5	35.42	22.92	14.6	65,08%
	Total	f	14	14	26	24	18	306
		%	14.58	14.58	27.08	25	18.8	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 63,75%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{306}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{306}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63.75\%$$

Wajib pajak badan menyampaikan SPT Masa nya kebanyakan pada tanggal 5 bulan berikutnya sebesar 27,08%, masih banyak wajib pajak badan yang melakukan keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak, keterlambatan tersebut antara tanggal 5,10,15 sampai 20 bulan berikutnya untuk SPT Masa tetapi yang paling banyak melakukan pelaporan SPT Masa pada tanggal 10 bulan berikutnya sebesar 18,57%.

Untuk pelaporan SPT Tahunan dilakukan banyak dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya sebesar 35,42%. Hal tersebut menunjukan bawha wajib pajak badan

masih cukup banyak yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

Kriteria melaporkan pajak tepat waktu yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah cukup jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 63,75% yang termasuk dalam kriteria cukup baik.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran tahapan dalam membuat *tax planing* pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.18
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Implementasi Aspek Formal *Tax Planing*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kategori
1	Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan	379	480	78,96%	Baik
2	Membayar Pajak	314	480	65,42%	Cukup
3	Menyampaikan Surat Pemberitahuan	306	480	63,75%	Cukup
	Total	**999**	**1440**	**69,37%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Secara keseluruhan implementasi aspek formal *tax planing* wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah baik ditunjukan dengan total skor aktual responden sebanyak 69,37%. Wajib pajak sudah melakukan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatannya dengan baik meskipun dalam hal membayar pajak serta menyampaikan surat pemberitahuan masih dalam kategoricukup baik.

Setelah diuraikan tanggapan responden pada masing-masing indikator pada setiap dimensi/aspek, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran *tax planing*

wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel *Tax Planing*

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%Skor Aktual	Kategori
1	**Motivasi *Tax Planing***	**1092**	**1440**	**75,83%**	**Baik**
2	**Tahapan *Tax Planing***	**2038**	**2640**	**77,19%**	**Baik**
3	**Implementasi Aspek Formal *Tax Planning***	**999**	**1440**	**69,37%**	**Baik**
	Total	**4129**	**5520**	**74,80%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa aspek formal perencanaan pajak pada KPP Madya Bandung sudah baik dengan persentasi skor actual sebesar 74,80%. Artinya wajib pajak badan yang ada pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh motivasi yang mendasari *tax planning*, tahapan dalam membuat *tax planing* dan implementasi aspek format *tax planning* sudah baik.

4.2.1.2 Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan Di Wilayah KPP Madya Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 48 orang responden tentang kepatuhan formal wajib pajak badan di KPP Madya Bandung. Sama halnya dengan aspek formal perencanaan pajak skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel kepatuhan formal wajib pajak. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai kepatuhan formal wajib pajak berdasarkan indikator:

4.2.1.2.1 Situasi Yang Mencerminkan Kepatuhan dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Berikut gambaran tanggapan 48 responden berkaitan dengan situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

A. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Semua Ketentuan Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator pemahaman wajib pajak terhadap semua ketentuan pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.20
Distribusi Jawaban Responden Mengenai PemahamanWP Terhadap Semua Ketentuan Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
18	Bagaimanakah Bapak/Ibu menyikapi tentang ketentuan perpajakan?	f	0	0	17	19	12	187
		%	0	0	35.42	39.58	25	77,92%
19	Seberapa besar Bapak/Ibu memahami tentang ketentuan pajak?	f	0	6	18	10	14	176
		%	0	12.5	37.5	20.83	29.2	73,33%
	Total	f	0	6	35	29	26	363
		%	0	6.25	36.46	30.21	27.1	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 75,63%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{363}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{363}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.63\%$$

Banyak wajib pajak yang sedikit mengetahui mengenai ketentuan perpajakan. Kemudian sebanyak 35,42% responden hanya tahu saja mengenai ketentuan perpajakan dan sebanyak 25% responden mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, namun ada juga Hal tersebut menunjukan bahwa pada umumnya wajib pajak hanya mengetahui dan sedikit memahami tentang semua ketentuan perpajakan yang berlaku.

Soal pemahaman tentang ketentuan perpajakan pada umumnya wajib pajak sudah cukup paham, ditunjukan dengan persentasi skor tanggapan responden sebesar 37,5%, hal tersebut menunjukan bahwa wajib pajak berusaha untuk memahami tentang ketentuan perpajakan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 75,63% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa meskipun hanya sedikit wajib pajak yang mengetahui tentang ketentuan perpajakan namun mereka sudah cukup paham tentang ketentuan perpajakan tersebut.

B. Mengisi Formulir Pajak Dengan Lengkap dan Benar

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.21
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Mengisi Formulir Pajak Dengan Lengkap Dan Benar

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
20	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengisis formulir pajak?	f	0	7	14	16	11	175
		%	0	14.58	29.17	33.33	22.9	72,92%
21	Apakah alasan Bapak/Ibu mengisi formulir dengan lengkap dan benar?	f	0	11	11	12	14	173
		%	0	22.92	22.92	25	29.2	72,08%
	Total	f	0	18	25	28	25	348
		%	0	18.75	26.04	29.17	26	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 72,50%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{348}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{348}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 72.50\%$$

Pengisisan formulir pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah secara lengkap ditunjukan dengan persentase sebesar 33,33% dan 29,17% secara benar. Hal tersebut manunjukan bahwa wajib pajak telah melakukan pengisian formulir dengan lengkap dan benar meskipun masih dalam taraf cukup baik.

Alasan wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar adalah kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal tersebut ditunjukan dengan persentase sebesar 29,2%, tetapi sebesar 22,92% wajib pajak beralasan agar tidak dikenakan sanksi dan karena terpaksa. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak masih sedikit memiliki kesdaran dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 72,50% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa pengisian formulir yang diisi oleh wajib

pajak dilakukan dengan benar karena sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

C. Menghitung Jumlah Pajak Terutang Dengan Benar

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.22
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menghitung Jumlah Pajak Terutang DenganBenar

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
22	Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memperhitungkan jumlah pajak?	f	0	7	12	16	13	179
		%	0	14.58	25	33.33	27.1	74,58%
23	Seperti apakah perhitungan pajak yang Bapak/Ibu lakukan?	f	0	4	19	16	9	174
		%	0	8.333	39.58	33.33	18.8	72,50%
	Total	f	0	11	31	32	22	353
		%	0	11.46	32.29	33.33	22.9	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 73,54%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{353}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{353}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 73.54\%$$

Perhitungan jumlah pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dengan cara memperhitungkan setengah dari penghasilan yang wajib pajak peroleh ditunjukan dengan persentase sebesar 33,33% dan sebesar 27,1% sesuai dengan tarif pajak yang dikenakan.

Perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan meminta bantuan konsultan pajak ditunjukan dengan persentase sebesar 39,58%, hal

tersebut menunjukan bahwa banyak wajib pajak yang meminta bantuan konsultan pajak dalam melakukan perhitungan pajaknya.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 73,54% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan wajib pajak sudah baik dengan meminta bantuan konsultan pajak.

D. Membayar Pajak Terutang Tepat Waktu

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator membayar pajak terutang tepat waktu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.23
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Membayar Pajak Terutang Tepat Waktu

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
24	Kapankah Bapak/Ibu melakukan pembayaran pajak Bulanan?	f	7	7	12	11	11	156
		%	14.58	14.58	25	22.92	22.92	65,00%
25	Kapankah Bapak/Ibu melakukan pembayaran pajak Tahunan?	f	5	7	16	9	11	158
		%	10.42	14.58	33.33	18.75	22.92	65,83%
	Total	f	12	14	28	20	22	314
		%	12.5	14.58	29.17	20.83	22.9	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65,42%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{314}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{314}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.42\%$$

Pembayaran pajak bulanan yang banyak dilakukan oleh wajib pajak yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan persentase sebesar 25%, dan dilakukan pada awal bulan serta setiap tanggal 5 bulan berikutnya sebesar 22,92%. Hal

tersebut menunjukan wajib pajak melakukan pembayaran pajak bulanannya pada saat pertengahan bulan berikutnya.

Pembayaran pajak tahunan yang banyak dilakukan oleh wajib pajak yaitu pada bulan maret berikutnya dengan persentase sebesar 33,33%, dan dilakukan pada bulan pertama tahun berikutnya sebesar 22,92%. Hal tersebut menunjukan wajib pajak melakukan pembayaran pajak tahunanya dengan cukup baik.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 65,42% yang berada pada kategori cukup baik. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah cukup baik.

E. Melaporkan Pajak Tepat Waktu

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator melaporkan pajak tepat waktu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.24
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Melaporkan Pajak Tepat Waktu

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
26	Kapankah Bapak/Ibu menyampaikan SPT Masa?	f	7	8	9	13	11	157
		%	14.58	16.67	18.75	27.08	22.9	65,42%
27	Kapankah Bapak/Ibu menyampaikan SPT Tahunan?	f	7	6	17	11	7	149
		%	14.58	12.5	35.42	22.92	14.6	65,08%
	Total	f	14	14	26	24	18	306
		%	14.58	14.58	27.08	25	18.8	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 63,75%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{306}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{306}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 63.75\%$$

Kriteria melaporkan pajak tepat waktu yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah cukup jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 63,75% yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Meskipun persentasi menunjukan cukup baik, masih banyak wajib pajak badan yang melakukan keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak, keterlambatan tersebut antara tanggal 5,10,15 sampai 20 bulan berikutnya untuk SPT Masa tetapi yang paling banyak melakukan pelaporan SPT Masa pada tanggal 10 bulan berikutnya sebesar 18,57%, sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan dilakukan banyak dilakukan pada bulan Maret tahun berikutnya sebesar 35,42%. Hal tersebut menunjukan bawha wajib pajak badan masih cukup banyak yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa maupun SPT Tahunan.

F. Tidak Menunggak Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator tidak menunggak pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.25
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tidak Menunggak Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
28	Keterlambatan pembayaran pajak yang pernah Bapak/Ibu lakukan?	f	5	9	20	9	5	144
		%	10.42	18.75	41.67	18.75	10.4	60.00%
29	Berapa lama Bapak/Ibu terlambat melakukan pembayaran pajak?	f	4	17	15	8	4	135
		%	8.333	35.42	31.25	16.67	8.33	56.25%
	Total	f	9	26	35	17	9	279
		%	9.375	27.08	36.46	17.71	9.38	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 58.13%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{279}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 58.13\%$$

Kriteria penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah cukup jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 58,13% yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Meskipun persentasi menunjukan cukup baik, masih banyak wajib pajak badan yang melakukan keterlambatan pembayaran pajak lebih dari satu kali sebesar 41,67% dan waktu keterlambatannya pun 3 sampai 4 minggu sebesar 35,42%.

G. Tidak Dijatuhi Hukuman

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator tidak dijatuhi hukuman dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.26
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tidak Dijatuhi Hukuman

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
30	Sanksi apakah yang pernah Bapak/Ibu terima?	f	0	8	21	19	0	155
		%	0	16.67	43.75	39.58	0	64.58%
31	Bagaimanakah cara Bapak/Ibu untuk menghindari sanksi yang diterima?	f	0	15	14	10	9	157
		%	0	31.25	29.17	20.83	18.8	65.42%
	Total	f	0	23	35	29	9	312
		%	0	23.96	36.46	30.21	9.38	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65.00%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{312}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{312}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.00\%$$

Kriteria tidak dijatuhi hukuman yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah cukup jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 65% yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Meskipun persentasi menunjukan cukup baik, masih banyak wajib pajak badan yang pernah dijatuhi hukuman berupa bunga sebesar 43,75% dan wajib pajak menghindari sanksi yang akan diterima dengan cara membayar pajak pada saat menerima surat teguran dari fiskus sebesar 31,25%.

H. Menyelenggarakan Pembukuan

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator menyelenggarakan pembukuan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.27
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Menyelenggarakan Pembukuan

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
32	Sepertiapakah metode pembukuan yang Bapak/Ibu lakukan?	f	0	0	0	35	13	205
		%	0	0	0	72.92	27.1	85.42%
33	Bagaimanakah cara Bapak/Ibu dalam melakukan pembukuan?	f	0	10	10	16	12	174
		%	0	20.83	20.83	33.33	25	72.50%
	Total	f	0	10	10	51	25	379
		%	0	10.42	10.42	53.13	26	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 78.96%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{379}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 78.96\%$$

Kriteria penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung sudah jelas, hal ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 78,96% yang termasuk dalam kriteria baik. Kriteria yang menunjukannya adalah pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak badan sudah dilakukan sesuai dengan memenuhi standar keuagan, hal tersebut di tunjukan dengan persantase sebesar 72,92% dan sebanyak 33,33% wajib pajak badan melakukan pembukuan dengan meminta bantuan orang yang lebih ahli.

Tabel 4.28
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Situasi Yang Mencerminkan Kepatuhan Dan Kesadaran Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pemahaman WP tentang ketentuan pajak	363	480	75,63%	Baik
2	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar	348	480	72,50%	Baik
3	Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar	353	480	73,54%	Baik
4	Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu	314	480	65,42%	Cukup
5	Melaporkan pajak tepat waktu	306	480	63,75%	Cukup
6	Tidak menunggak pajak	279	480	58,13%	Cukup
7	Tidak dijatuhi hukuman	312	480	65,00%	Cukup
8	Menyelenggarakan pembukuan	379	480	78,96%	Baik
	Situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran Pemenuhan kewajiban perpajakan	**2654**	**3840**	**69,11%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Secara keseluruhan situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran Pemenuhan kewajiban perpajakan pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah baik. Wajib pajak sudah memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan

pajak, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan benar, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, akan tetapi dalam hal membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu serta melaporkan pajak tepat waktu masih dalam tarap cukup, kemudian dalam hal penunggakan pajak dan dalam hal dijatuhi hukuman pun masih dalam tahap cukup. Meskipun seperti itu, wajib pajak juga sudah menyelenggarakan pembukuan dengan baik.

4.2.1.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut gambaran tanggapan 48 responden berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

A. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.29
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
34	Menurut Bapak/Ibu sepertiapakah kondisisistem administrasi perpajakan Indonesia sekarang ini?	f	6	0	16	12	14	172
		%	12.5	0	33.33	25	29.2	71.67%
35	Bagaimanakah administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Bapak/ibu?	f	0	0	17	16	15	190
		%	0	0	35.42	33.33	31.3	79.17%
	Total	f	6	0	33	28	29	362
		%	6.25	0	34.38	29.17	30.2	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 75.42%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{362}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{362}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 75.42\%$$

Kondisi administrasi perpajakan di Indonesia sekarang ini dirasa sudah baik meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, hal tersebut ditunjukan dengan persentase skor tanggapan responden sebesar 33,33% meskipun sebanyan 29,2% merasa sudah berjalan semakin baik dan bagus.

Administrasi perpajakan yang dilakukan oleh kebanyakan wajib pajak pun mengikuti aturan pemerintah dengan persentase skor tanggapan responden sebesar 35,42% dan sesuai dengan kebijakan perusahaan sebanyak33,33%.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 75,42% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa kondisi administrasi perpajakan sudah baik dan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak mengikuti aturan pemerintah.

B. Pelayanan Pada Wajib Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator pelayanan pada wajib pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.30
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Pada Wajib Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
36	Bagaimanakah pelayanan fiskus terhadap Bapak/Ibu sebagaiwajib pajak?	f	0	11	14	14	9	165
		%	0	22.92	29.17	29.17	18.8	68.75%
37	Bagaimanakah kondisi pada saat Bapak/Ibu datang ke KPP?	f	4	8	19	11	6	151
		%	8.333	16.67	39.58	22.92	12.5	62.92%
	Total	f	4	19	33	25	15	316
		%	4.167	19.79	34.38	26.04	15.6	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65.83%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{316}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{316}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.83\%$$

Pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sudah baik, ditunjukan dengan persentase skor responden yakni sebesar 29,17% dan kondisi pada saat wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak mereka harus menunggu lama untuk dilayani karena petugasnya hanya sedikit menurut persentase skor responden sebesar 35,98%.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 65,83% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sudah baik, meskipun pada saat wajib pajak datang ke kantor pelayanan pajak mereka harus menunggu lama untuk dilayani dikarenakan jumlah petugasnya masih sedikit.

C. Penegakan Hukum Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator penegakan hukum pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.31
Distribusi Jawaban Respoden Mengenai Penegakan Hukum Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
38	Menurut Bapak/Ibu bagaimana penegakan hukumpajak sekarang ini?	f	4	13	10	13	8	152
		%	8.333	27.08	20.83	27.08	16.7	63.33%
39	Bagaimanakah cara Bapak/Ibu menyikapi penegakan hukumpajak sekarang ini?	f	0	16	7	11	14	167
		%	0	33.33	14.58	22.92	29.2	69.58%
	Total	f	4	29	17	24	22	319
		%	4.167	30.21	17.71	25	22.9	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 66.46%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{319}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{319}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 66.46\%$$

Penegakan hukum pajak sekarang ini masih harus terus ditingkatkan dan lebih tegas lagi agar para pelanggar merasa jera, tetapi meskipun seprti itu masih banyak pelaku kejahatan pajak yang bebas dari hukuman, anggapan wajib pajak tersebut sebesar 27,08% menurut persentase skor responden. Akan tetapi dalam hal menyikapi tentang penegakan hukum saat ini, para wajib pajak masih bersikap acuh tak acuh, seperti yang ditunjukan pada persentase skor responden yakni sebesar 33,33%, meskipun demikian banyak juga wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 66,46% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pajak harus ditingkatkan lagi agar para pelanggar jera meskipun sekarang masih banyak pelaku kejahatan pajak yang bebas dari hukuman. Wajib pajak mendukung penegakan hukum pajak dengan cara mematuhi peraturan yang berlaku, meskipun masih banyak wajib pajak yang acuh dengan hal tersebut.

D. Pemeriksaan Pajak

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator pemeriksaan pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.32
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
40	Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah pemeriksaan pajak yang harus dilakukan?	f	0	7	13	14	14	179
		%	0	14.58	27.08	29.17	29.2	74.58%
41	Menurut Bapak/Ibu siapakah yang seharusnya melakukan pemeriksaan pajak?	f	0	3	2	22	21	205
		%	0	6.25	4.167	45.83	43.8	85.42%
	Total	f	0	10	15	36	35	384
		%	0	10.42	15.63	37.5	36.5	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 80.00%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{384}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 80.00\%$$

Menurut persentase skor tanggapan responden dalam hal pemeriksaan pajak yang yang seharusnya dilakukan adalah memeriksa seluruh penghasilan yang kena pajak sebesar 29,17% dan yang dilaporkan di dalam SPT.

Wajib pajak berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut seharusnya dilakukan oleh petugas khusus pemeriksa pajak dan di bantu oleh POLRI, responden yang beranggapan seprti itu sebesar 45,83% dan sebesar 43,8% wajib pajak beranggapan pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh petugas khusus pemeriksa pajak.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 80,00% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa semua penghasilan kena pajak yang dilaporkan di SPT harus diperiksa, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh petugas khusus pemeriksa pajak dengan dibanru oleh POLRI agar wajib pajak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

E. Tarif Pajak.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden atas indikator tarif pajak dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.33
Distribusi Jawaban Responden Mengenai Tarif Pajak

No	Butir Kuesioner		Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor
			1	2	3	4	5	
42	Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu tentang penetapan tarif pajak?	f	0	13	13	12	10	163
		%	0	27.08	27.08	25	20.8	67.92%
43	Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu tentang kenaikan tarif pajak saat ini?	f	4	9	18	11	6	150
		%	8.333	18.75	37.5	22.92	12.5	62.50%
	Total	f	4	22	31	23	16	313
		%	4.167	22.92	32.29	23.96	16.7	
Persentase Total SkorTanggapan Responden = 65.21%								

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{313}{2x5x48} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{313}{480} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 65.21\%$$

Penetapan tarif pajak saat ini harus lebih disesuaikan lagi, karena wajib pajak beranggapan bahwa tarif pajak harus lebih disesuaikan lagi meskipun persentase skor tanggapan responden tentang tarif pajak harus disesuaikan lagi dengan yang beranggapan sesuai-sesuai saja sama, yakni sebesar 27,08%. Hal tersebut menunjukan bahwa tarif pajak memang harus disesuaikan lagi.

Meskipun demikian wajib pajak merasa setuju-setuju saja tentang kenaikan pajak saat ini ditunjukan dengan perolehan persentase skor responden sebesar 37,5%. Wajib pajak setuju meningkatkan tarif pajak agar dapat menambah pendapatan Negara dari sector perpajakan.

Dari kedua pertanyaan tersebut diperoleh persentase skor tanggapan responden mengenai kebijakan perpajakan sebesar 65,21% yang berada pada kategori baik. Ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif pajak sekarang ini harus disesuaikan lagi, meskipun perlu disesuaikan lagi wajib pajak tetap setuju dengan kenaikan tersebut agar dapat menambah pendapatan Negara dari sector pajak.

Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Dimensi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kondisi sistem administrasi perpajakan	362	480	75,42%	Baik
2	Pelayanan pada wajib pajak	316	480	65,83%	Cukup
3	Penegakan hukum pajak	319	480	66,46%	Cukup
4	Pemeriksaan pajak	384	480	80,00%	Baik
5	Tarif pajak	313	480	65,21%	Cukup
	Total	**1694**	**2400**	**70,58%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Bandung pada umumnya sudah baik. Wajib pajak menilai sistem administrasi perpajakan saat ini sudah memadai meskipun pelayanan terhadap wajib pajak disertai dengan penegakan hukum pajak yang sudah cukup baik. Pemeriksaan pajak juga sudah dilakukan dengan baik meskipun tarif pajak yang dikenakan masih cukup memberatkan bagi Wajib Pajak.

Setelah diuraikan tanggapan responden pada masing-masing indikator pada setiap dimensi/aspek, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran kepatuhan wajib pajak formal pada KPP Madya Bandung secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kedua dimensi dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 4.35
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Formal

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kategori
1	Situasi yang mencerminkan kepatuhan dan kesadaran Pemenuhan kewajiban perpajakan	**2654**	**3840**	**69,11%**	**Baik**
2	Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	**1694**	**2400**	**70,58%**	**Baik**
	Total	**4348**	**6240**	**69,67%**	**Baik**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Bandung sudah baik meskipun persentasenya berada sedikit diatas kriteria cukup baik. Artinya wajib pajak badan yang ada pada KPP Madya Bandung sudah memperlihatkan kepatuhan dengan kesadaran sendiri memenuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak juga sudah diperhatikan dengan seksama oleh KPP Madya Bandung.

4.2.2 Analisis Kuantitatif

4.2.2.1 Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan Di Wilayah KPP Madya Bandung.

Pada sub bab ini hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik. Hipotesis yang diajukan adalah pengaruh dari penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Data variabel X (penerapan aspek formal perencanaan pajak) dan variabel Y (kepatuhan formal wajib pajak badan) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut:

Pada bagian ini hipotesis konseptual yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan melalui uji statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan seperti yang telah dituangkan di dalam bab II yaitu pengaruh dari penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi.

Tabel 4.36
Rekap Data Variabel Penerapan aspek formal perencanaan pajak (X) dan Variabel Kepatuhan formal wajib pajak (Y)

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
1	67.2435757	72.7849224	4521.69848	5297.64493	4894.31844
2	54.8279206	52.0957031	3006.10088	2713.96228	2856.29907
3	57.5251266	51.6897227	3309.14019	2671.82743	2973.45784
4	69.9139579	60.2602442	4887.96151	3631.29703	4213.03217
5	66.2566591	80.957375	4389.94488	6554.09656	5363.9652
6	51.8750661	58.3271667	2691.02248	3402.05837	3025.72562
7	71.4024829	75.3183551	5098.31457	5672.85462	5377.91757
8	62.5384601	57.6964411	3911.059	3328.87931	3608.24658
9	45.822586	57.6090892	2099.70939	3318.80715	2639.79744
10	65.1154546	69.5136745	4240.02243	4832.15094	4526.41452
11	69.6604277	68.1995667	4852.57519	4651.18089	4750.81098
12	75.3356438	78.909864	5675.45923	6226.76664	5944.72541
13	61.37148	72.1438033	3766.45855	5204.72835	4427.57198
14	68.6947969	81.3271116	4718.97512	6614.09909	5586.74942
15	50.2912806	55.8013722	2529.2129	3113.79314	2806.32247
16	49.7820101	46.2092647	2478.24853	2135.29614	2300.39008
17	64.7002759	62.9330445	4186.12571	3960.56809	4071.78535

Responden	X	Y	X^2	Y^2	XY
18	73.8017996	72.694322	5446.70562	5284.46445	5364.97178
19	55.9475714	54.225473	3130.13074	2940.40193	3033.78352
20	49.2117218	41.7293724	2421.79356	1741.34052	2053.57427
21	69.0306671	70.9035399	4765.233	5027.31197	4894.51866
22	77.770179	82.5499325	6048.20075	6814.49136	6419.92303
23	76.7575648	80.2854366	5891.72376	6445.75133	6162.5146
24	54.4004291	46.3710145	2959.40669	2150.27099	2522.60309
25	71.8423177	54.4063433	5161.31861	2960.05019	3908.6778
26	58.2526372	53.835532	3393.36974	2898.26451	3136.06171
27	50.0988939	66.1782417	2509.89917	4379.55967	3315.45671
28	56.8594445	50.4367813	3232.99643	2543.86891	2867.80737
29	73.0501082	75.1660507	5336.31831	5649.93518	5490.88814
30	76.7584618	74.6741456	5891.86147	5576.22802	5731.87256
31	44.504846	57.9333762	1980.68132	3356.27608	2578.31598
32	66.5097444	76.6209595	4423.5461	5870.77144	5096.04043
33	75.8311701	83.3486089	5750.36636	6946.9906	6320.42254
34	37.806671	45.1487476	1429.34437	2038.40941	1706.92385
35	60.2890501	45.7799844	3634.76956	2095.80697	2760.03178
36	70.4641075	81.2733274	4965.19044	6605.35375	5726.85248
37	72.8619927	65.9040757	5308.86998	4343.34719	4801.90228
38	49.2388705	43.8018656	2424.46637	1918.60343	2156.75439
39	62.8433823	72.4634569	3949.2907	5250.95258	4553.84872
40	78.8870804	83.8829866	6223.17145	7036.35544	6617.2839
41	48.9996668	85.9186713	2400.96735	7382.01808	4209.98627
42	49.9372163	49.5672822	2493.72557	2456.91546	2475.25209
43	78.2484814	79.4535979	6122.82484	6312.87422	6217.12338
44	76.9720286	84.1986957	5924.69319	7089.42036	6480.94442
45	55.2458375	49.1378685	3052.10256	2414.53012	2714.6627
46	68.3487684	59.5568884	4671.55414	3547.02295	4070.63997
47	72.7332827	83.7470222	5290.13042	7013.56373	6091.19585
48	70.8423678	87.7862201	5018.64108	7706.42044	6218.98369
Jumlah	**3036.70357**	**3160.75654**	**197615.323**	**217127.582**	**205067.348**

Sumber: Data primer yang telah diolah, Juli 2010

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi digunakan untuk mencari dan menguji keterkaitan antara penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh output regresi keterkaitan dengan penerapan aspek formal

perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan. Maka dapat dilihat hasil pengolahan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.37
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.145	8.325		.858	.395
	Aspek Formal Perencanaan Pajak	.928	.130	.726	7.151	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Melalui hasil regressi yang terdapat pada tabel di atas maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:

Y = 7,145 + 0,928 X

Dimana : Y = Kepatuhan formal wajib pajak

X = Penerapan aspek formal perencanaan pajak

Artinya nilai a dan b tersebut adalah :

a = 7,145, angka ini mengidentifikasikan bahwa bila tidak ada aspek formal perencanaan pajak, maka kepatuhan formal wajib pajak badan adalah 7,145 persen (bila X sama dengan nol).

b = 0,928, angka ini mengidentifikasikan bahwa variabel aspek formal perencanaan pajak (X) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,928. Berarti jika aspek formal perencanaan pajak sebesar satu satuan maka kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung akan naik sebesar sebesar 0,928.

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik penerapan aspek formal perencanaan

pajak diduga akan meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Madya Bandung. Sebaliknya, semakin tidak baik penerapan aspek formal perencanaan pajak diduga akan menurunkan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Madya Bandung.

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk melihat kedekatan hubungan antara variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya yaitu penerapan aspek formal perencanaan pajak yang mempengaruhi kepatuhan formal wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS 15 for windows*, diperoleh hasil estimasi besarnya hubungan antara penerapan aspek formal perencanaan pajak dengan kepatuhan formal wajib pajak seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.38
Korelasi Antara Variabel X dengan Variabel Y

Correlations

		Aspek Formal Perencanaan Pajak	Kepatuhan Formal Wajib Pajak
Aspek Formal Perencanaan Pajak	Pearson Correlation	1	.726**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	48	48
Kepatuhan Formal Wajib Pajak	Pearson Correlation	.726**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	48	48

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Melalui hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar hubungan antara variabel penerapan aspek formal perencanaan pajak dengan kepatuhan formal wajib pajak yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,726. Hal ini

menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat antara penerapan aspek formal perencanaan pajak dengan kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Madya Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin baik penerapan aspek formal perencanaan pajak akan membuat kepatuhan formal wajib pajak semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik penerapan aspek formal perencanaan pajak akan membuat kepatuhan formal wajib pajak makin turun.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan menggunakan *software SPSS 15 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.39
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726[a]	.526	.516	9.62211

a. Predictors: (Constant), Aspek Formal Perencanaan Pajak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,526, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi (KD).

KD = 0,526 x 100% = 52,6%

Koefisien determinasi sebesar 52,6% menunjukkan bahwa 52,6% perubahan yang terjadi pada kepatuhan formal wajib pajak pada 48 wajib pajak di wilayah KPP Madya Bandung bisa dijelaskan oleh penerapan aspek formal perencanaan pajak. Artinya penerapan aspek formal perencanaan pajak mampu

memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Madya Bandung sebesar 52,6%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 47,4% dijelaskan variabel lain di luar variabel penerapan aspek formal perencanaan pajak yaitu aspek material dalam perencanaan pajak seperti pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negative serta penghindaran sanksi pajak (Erly Suandy, 2008:8).

4.2.2.2 Pengujian Hipotesis

Selanjutnya, masih dengan menggunakan data perhitungan pada tabel 4.36 di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat peranan yang signifikan dari hipotesis yang telah dibuat yaitu " Peranan Aspek Formal Perencanaan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan" (Studi Kasus Pada 48 Wajib Pajak Badan Di Wilayah KPP Madya Bandung), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung..

H_a : Terdapat pengaruh antara penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

b. Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian diatas, maka penulis menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (Ho) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yaitu hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$, Tidak terdapat hubungan antara penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

$H_a : \rho \neq 0$, Terdapat hubungan antara penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

2. Menguji Tingkat Signifikansi

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien *Korelasi*, maka dapat menggunakan statistik uji t *student* dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{rs\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-rs^2}}$$

Sugiyono, 2008:184

Keterangan :

t : nilai uji t
rs : koefisien *Korelasi*
n : jumlah sampel

Untuk mengetahui ditolak atau tidaknya hipotesis, Riduwan dan Sunarto (2007:83) mengungkapkan kaidah yang digunakan dalam pengujian terhadap hipotesis penelitian sebagaimana dikutip berikut ini:

"Kaidah pengujian:

Jika $t_{hitung} \geq t_{table,}$ maka tolak H_0 artinya signifikan dan

$t_{hitung} \leq t_{table,}$ maka terima H_0 artinya tidak signifikan."

Nilai t tabel bisa ditemukan dengan bantuan tabel distribusi t s*tudent* yang sudah tersedia secara umum, dengan ketentuan pencarian 0,05 (½α = 0,025) dan derajat kebebasan atau dk = (jumlah data – 2) atau 48-2 = 46.Berdasarkan tabel 4.34 yaitu tabel statistik *SPSS* korelasi, di dapat angka probabilitasnya yaitu 0,726. Maka berdasarkan hasil dari angka probabilitas tersebut, disimpulkan bahwa 0,726 > 0,05 maka Ho ditolakdan Ha diterima sehingga terdapat peranan yang signifikan antara variabel aspek formal perencanaan pajak dan variabel kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah KPP Madya Bandung.

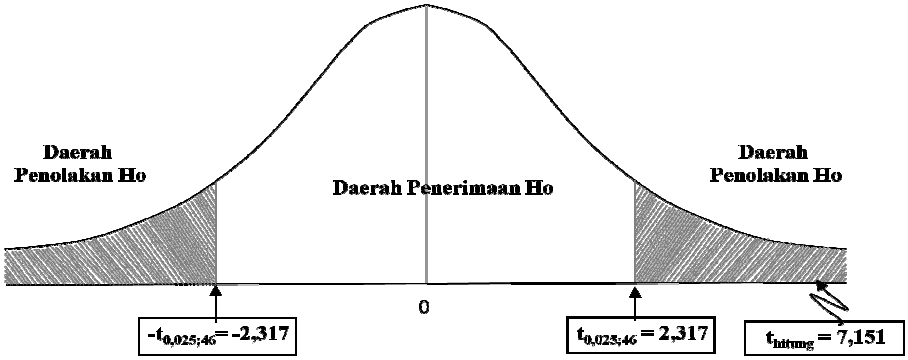
3. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

- Jika $t_{hitung} \geq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
- t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan
- t tabel; dicari didalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut ½α = 0,025 dan dk = (jumlah data – 2) atau 48-2=46

Dari hasil perhitungan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,151 > 2.317). Artinya Ho berada di daerah penolakan dan Ha diterima, menjelaskan bahwa aspek formal perencanaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal wajib pajak badan.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka digambarkan daerah penerimaan atau penolakan.



Gambar 4.1
Grafik Daerah Penerimaan dan Penolak Ho

4. Penarikan Kesimpulan

Melalui hasil pengolahan data pada tabel hasil analisis regresi, diperoleh nilai t_{hitung} 7,151, sementara pada t_{tabel} dengan tingkat signifikasi 5% ($\frac{1}{2}\alpha = 0,025$) dan derajat bebas (48-2) = 46 pada pengujian dua arah adalah sebesar ±2,317. Karena t_{hitung} (7,151) lebih besar dari t_{tabel} (2,317), maka pada tingkat kekeliruan 5% dan taraf kepercayaan 95% dengan Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh penerapan aspek formal perencanaan pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Madya Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan aspek formal perencanaan pajak signifikan dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung.